



2026

RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto ini dapat terselesaikan dengan baik.

Renja BPKPD merupakan dokumen perencanaan BPKPD untuk periode 1 tahun, yang secara substansial merupakan penjabaran program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKPD. Namun kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan untuk perbaikan penyusunan Renja di tahun yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penyusunan Renja BPKPD Kota Mojokerto. Semoga Renja ini bermanfaat bagi BPKPD sebagai acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2026 untuk penyelenggaraan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Mojokerto, 24 Juli 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH
KOTA MOJOKERTO

RIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	33
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPD.....	36
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	52
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	53
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	54
3.3. Program dan Kegiatan.....	56
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	66
Bab V. PENUTUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan ;
- b. Penyusunan rancangan awal ;
- c. Penyusunan rancangan ;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah ;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan

pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan dokumen Rencana Kerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto pada Tahun 2025 dengan berdasarkan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2025 ;

- 2) Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja;
- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Landasan Hukum,
- 1.3. Maksud dan Tujuan,
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD tahun lalu dan capaian Renstra BPKPD adalah mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD tahun lalu adalah sebagai berikut :

INDIKATOR 1: NILAI SAKIP

Tabel 3. 3 Indikator Ke-1

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	85,66	86,4	100,86%	Sangat Baik

Berdasarkan surat Inspektorat nomor: 700.1.2.7/1138/417.400.3/2024 Tanggal 9 September 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Bahwa Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 86,4 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat

memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, dan telah melakukan pengukuran kinerja mulai pimpinan hingga pada level dibawahnya.

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	86,40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A



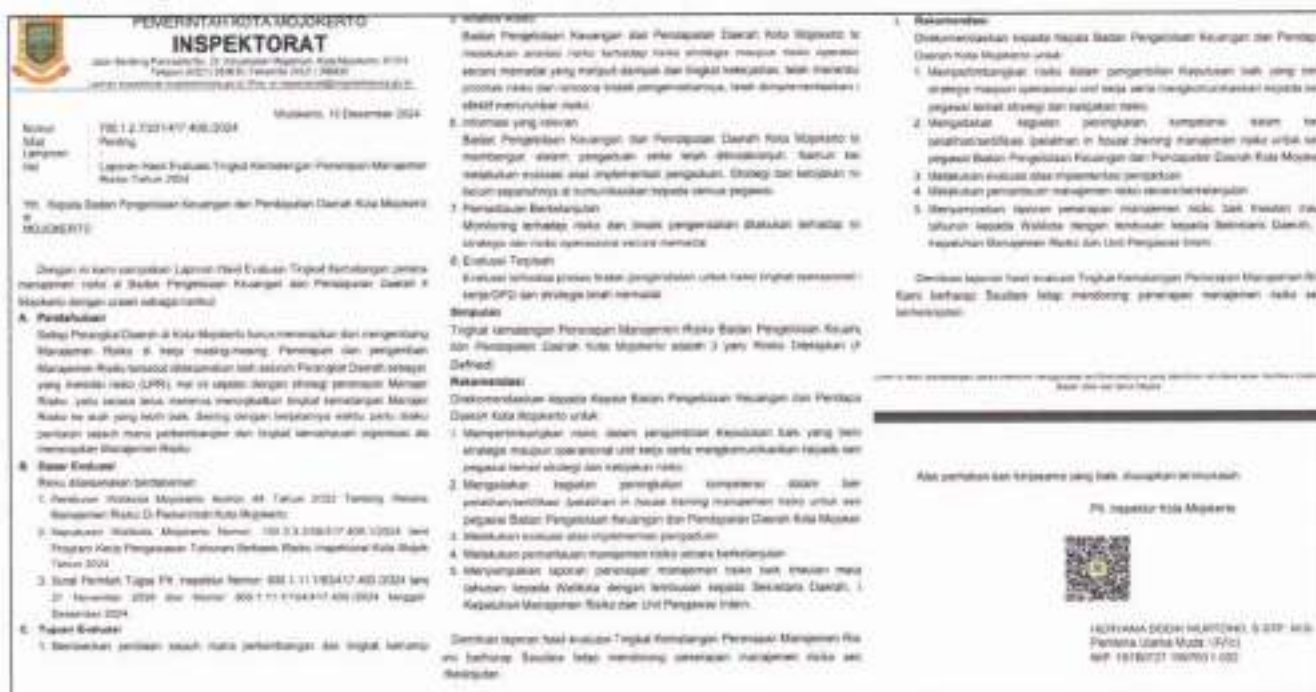
INDIKATOR 2: INDEKS MANAJEMEN RISIKO

Tabel 3. 4 Indikator Ke-2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100%	Baik

Berdasarkan surat Inspektorat nomor: 700.1.2.7/201/417.400./2024 Tanggal 15 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Kematangan Penerapan

Manajemen Risiko. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yaitu 3.10 dengan kesimpulan level 3. Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah 3 yaitu Risiko Ditetapkan (Risk Defined). Proses Manajemen Risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif.



Gambar 3. 1 Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)

INDIKATOR 3: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Tabel 3. 5 Indikator Ke-3

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,75	91,75	100%	Baik

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 mencapai target yakni 91,75 dari target 91,75. Data tersebut diambil melalui kegiatan survey kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi SUKMA-E JATIM. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dapat melampaui standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak baik
65,00 – 76,60	C	Kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat baik

IS BPKPD	Tahun										91,75	Sangat Baik	290	Aplikasi SuKMa E				
	Semester 1 (Januari - Juni)																	
	94,34	94,81	92,92	100	93,87	93,4	90,87	98,11	92,45									
	Semester 2 (Juli - Desember)																	
Rata-rata Tahunan										91,61	91,27	90,24	96,75	91,91	91,78	92,81	97,95	91,44

Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

INDIKATOR 4: PERSENTASE PENGGUNAAN ANGGARAN SESUAI APBD

Tabel 3. 6 Indikator Ke-4

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD	100%	94,29%	94,29%	Cukup

Untuk Indikator Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD, realisasi 2024 sebesar 94,29% dari target 100%. Data tersebut berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2024 Data Per 15 Januari 2024 (Unaudited). Menetapkan target Indikator Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD tahun 2024 terlalu tinggi menyebabkan target tidak tercapai. APBD tidak dapat diserap tepat 100% atau melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu pada tahun selanjutnya akan dilakukan revisi dengan menurunkan target.

Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen-komponen Belanja Daerah. Adapun komponen-komponen Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Komponen Belanja Daerah 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024 setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Operasi	924.733.858.565	881.387.889.533	95,31
2	Belanja Modal	157.400.338.112	147.891.506.058	93,96
3	Belanja Tak Terduga	9.679.493.980	150.739.700	1,56
	JUMLAH	1.091.813.690.658	1.029.430.135.291	94,29

Formula Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD 2024

$$\frac{\text{realisasi anggaran tahun } n}{\text{Anggaran tahun } n} \times 100\%$$

$$\frac{1.029.430.135.291}{1.091.813.690.658} \times 100\% = 94,29\%$$

INDIKATOR 5: PERSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKELOLA OPD

Tabel 3. 8 Indikator Ke-5

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	100%	100%	100%	Baik

Realisasi 2024 atas indikator kinerja Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD telah tercapai yakni 100% dari target 100%. Aset yang tidak dikelola OPD adalah aset yang melalui proses sebagai berikut:

- a. Proses Penilaian
- b. Proses Penjualan
- c. Proses Penghapusan

Untuk memperoleh Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Formula Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD 2024

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Aset yang dikelola}}{\text{Total jumlah aset yang tidak digunakan OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Proses Penilaian} + \text{Proses Penjualan} + \text{Proses Penghapusan}}{\text{Total Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{0 \text{ item barang} + 8.480 \text{ item barang} + 461 \text{ item barang}}{8.941 \text{ item barang}} \times 100\% \\ &= \frac{8.941}{8.941} \times 100\% \end{aligned}$$

INDIKATOR 6: PERSENTASE PENINGKATAN PAD

Tabel 3. 9 Indikator Ke-6

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	11%	5,41%	49,18%	Sangat Kurang

Untuk Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, realisasi 2024 sebesar 5,41% dari target 11%. Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, menurunnya realisasi komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah, maka akan menurunkan persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah, demikian pula sebaliknya. Adapun komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Realisasi PAD Kota Mojokerto Tahun 2024 sebesar Rp. 270.623.653.368,66 dari target sebesar Rp. 277.618.024.743,00 atau 97,48% Adapun rincian PAD Kota Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 10Target dan Realisasi Komponen PAD 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024 setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Daerah	88.815.600.000,00	90.931.898.741,00	102,38
2	Retribusi Daerah	159.944.516.261,00	148.317.798.002,00	92,73
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.921.070.337,00	3.921.070.336,89	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	24.936.838.145,00	27.452.886.288,77	110,09
	JUMLAH	277.618.024.743,00	270.623.653.368,66	97,48

Dari tabel Target dan Realisasi Komponen PAD 2024, diketahui bahwa terdapat komponen PAD yang berhasil memenuhi target yang ditetapkan dan terdapat juga komponen PAD yang belum memenuhi target. Komponen PAD yang memenuhi target yakni Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pencapaian pajak daerah diketahui dari target sebesar Rp. 88.815.600.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 90.931.898.741,00 atau 102,38%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diketahui dari target sebesar Rp. 3.921.070.337,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.921.070.336,89 atau 100,00%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diketahui dari target sebesar Rp. 24.936.838.145,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 27.452.886.288,77 atau 110,09%.

Sedangkan komponen PAD yang belum memenuhi target yakni Retribusi Daerah dari target sebesar Rp. 159.944.516.261,00 dapat terealisasi sebesar Rp.

148.317.798.002,00 atau 92,73 hal ini belum mencapai dari jumlah target penerimaan sebesar Rp. 11.626.718.259,00 karena ret PBG/persetujuan bangunan gedung yang sangat rendah. Selain itu untuk retribusi parkir tepi jalan umum, Pemungutan belum optimal karena sejak 16 maret s/d 30 september belum ada dasar hukum PKS Parkir sehingga hanya ditarik secara konvensional (bagi kendaraan luar Mojokerto Raya). Pemungutan parkir berlangganan mandiri baru di laksanakan sejak tanggal 1 oktober 2024

Rincian penerimaan dari Retribusi Daerah, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 11 Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024 setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	155.359.531.021,00	145.763.147.729,00	93,82
2	Retribusi Jasa Usaha	2.184.985.240,00	1.816.128.640,00	83,12
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.400.000.000,00	738.521.633,00	30,77
	JUMLAH	159.944.516.261,00	148.317.798.002,00	92,73

Formula Persentase Pertumbuhan PAD 2024

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2024

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n - 1}{\text{Realisasi tahun } n - 1} \times 100\% \\
 &= \frac{270.623.653.368,66 - 256.729.510.362,44}{256.729.510.362,44} \times 100\% \\
 &= 5,41\%
 \end{aligned}$$

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
04.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH									
5.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		A						
		Indeks MR		3						
		Indeks Kepuasan Masyarakat		88,3						
5.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan		100%						
5.02.0 1.2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		47 orang/bula n						
5.02.0 1.2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen						

5.02.0 1.2.02. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan						
5.02.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi			100%						
5.02.0 1.2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset/tanah yang PGBnya dibayar tepat waktu			1 Laporan						
5.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan			100%						
5.02.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			6 Paket						
5.02.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket						
5.02.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket						
5.02.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket						
5.02.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacuan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacuan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			12 Dokumen						
5.02.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60 Laporan						
		Jumlah Laporan Hasil Pejabatian Dinas Luar			60 Laporan						

		Jumlah Kunjungan Tamu yang disesiliasi																	
5.02.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ			12 Kali														
5.02.0 1.2.07- 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			25 Unit														
5.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan			100%														
5.02.0 1.2.08- 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60 Laporan														
5.02.0 1.2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			80 Laporan														
5.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik			100%														
5.02.0 1.2.09- 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			26 unit														
5.02.0 1.2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2201 Unit														
5.02.0 1.2.09 09	Pemeliharaan/Reta bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara			1 unit														

5.02.0 2.2.02. 10	Penyusunan Pelunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Perusahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	diproses sesuai keterangan yang berlaku			SPZD														
5.02.0 2.2.02. 11	Pembinaan Perusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			200 Orang														
5.02.0 2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan CPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP			100%														
5.02.0 2.2.03. 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-L.O dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-L.O, dan Beban			852 Dokumen														
5.02.0 2.2.03. 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			85 Laporan														
5.02.0 2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Semesteran	Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana			1 Laporan														
5.02.0 2.2.04. 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan														

5.02.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	90%						
5.02.0 3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	90%						
5.02.0 3.2.01. 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen						
5.02.0 3.2.01. 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25 Dokumen						
5.02.0 3.2.01. 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan						
5.02.0 3.2.01. 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan						
5.02.0 3.2.01. 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mangikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang						
5.02.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%						
5.02.0 4.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	100%						
5.02.0 4.2.01. 02	Analisa dan Pengkembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Keijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen						
5.02.0 4.2.01. 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	720 Layanan						
5.02.0 4.2.01. 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Diakukan Penelitian dan Verifikasi	1200 Dokumen						

5.02.0 4.2.01. 11	Penagihan Fajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	240 Dokumen							
5.02.0 4.2.01. 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan							
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH									
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN									
5.02.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penelausahaan Sesuai Ketentuan persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran Persentase Laporan Keuangan OPD dengan Catatan Baik		100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %				
5.02.0 2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu Persentase dokumen rancangan perda dan perwal APBD serta rancangan perda dan perwal P-APBD yang disusun tepat waktu		100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %				
5.02.0 2.2.01. 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	100 %				

5.02.0 2.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 Dokumen	2 Dokumen	100 %				
5.02.0 2.2.01. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dokumen	2 Dokumen	100 %				
5.02.0 2.2.01. 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					2 Dokumen	2 Dokumen	100 %				
5.02.0 2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kas Daerah sesuai ketentuan Persentase laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kas Daerah sesuai ketentuan Persentase Layanan Pertanggungjawaban sesuai ketentuan Persentase Layanan Pertanggungjawaban sesuai ketentuan					100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %				

5.02.0 2.2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					60 Dokumen	60 Dokumen	100 %				
5.02.0 2.2.02 0009	Rekonsiliasi Data Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					440 Dokumen	440 Dokumen	100 %				
5.02.0 2.2.02 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					1 Dokumen	1 Dokumen	100 %				
5.02.0 2.2.02 0011	Pertimbangan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang					200 Orang	200 Orang	100 %				

		Mengikuti Pembinaan Pembelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota												
5.02.0 2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP Persentase CPD yang maktakan Rekonsitasi Kas dan Akuntansi tepat waktu						100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %				
5.02.0 2.2.03. 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-L/O dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-L/O, dan Beban						852 Dokumen	852 Dokumen	100 %				
5.02.0 2.2.03. 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran Terselenggara dari darurat pertanggungjawaban bencana						96 Laporan	96 Laporan	100 %				
5.02.0 2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggara dari darurat pertanggungjawaban bencana						1 Laporan	1 Laporan	100 %				
5.02.0 2.2.04. 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							1 Laporan	1 Laporan	100 %				

		Pengetasan Dana Darurat dan Menkosak																	
5.02.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan																	
5.02.0 3.2.01	Pengeolaan Barang Milk Daerah	Persentase Barang Milk Daerah yang di Monitor Persentase laporan Barang Milk Daerah yang diusun sesuai aturan yang berlaku																	
5.02.0 3.2.01. 0001	Penyusunan Standar Harga																		
		Jumlah Standar Harga yang Disusun																	
5.02.0 3.2.01. 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah																		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah																	
5.02.0 3.2.01. 0007	Pengamanan Barang Milk Daerah																		
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milk Daerah																	
5.02.0 3.2.01. 0008	Penilaian Barang Milk Daerah																		
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah																	
5.02.0 3.2.01. 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah																	

			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOT A		Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD	88.6 - 2 Level 81.45 -	88.6 - 2 Level 81.45 -	100 %													
X.XX.01.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	100 %	100 %	100 %													
X.XX.01.2.0.1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %													
X.XX.01.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	100 %	100 %	100 %													
X.XX.01.2.0.2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	100 %													
X.XX.01.2.0.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %													
X.XX.01.2.0.3.0008	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %													

X.XX 01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang memenuhi sesuai standar					100 %	100 %	100 %				
X.XX 01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					6 Paket	6 Paket	100 %				
X.XX 01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	100 %				
X.XX 01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	100 %				
X.XX 01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	100 %				
X.XX 01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	100 %				
X.XX 01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan					60 Laporan	60 Laporan	100 %				

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2026

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
X.XX.012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar						100 %	100 %	100 %									
X.XX.012.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	100 %									
X.XX.012.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	1 Unit	100 %									
X.XX.012.07.0010	Pengadaan Sarana dan Pemesanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Pemesanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						5 Unit	5 Unit	100 %									
X.XX.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar						100 %	100 %	100 %									
X.XX.012.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	100 %									
X.XX.012.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum																		

8.0004	Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	100 %				
X.XX.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang bertumbuh Baik						100 %	100 %	100 %				
X.XX.012.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						5 Unit	5 Unit	100 %				
X.XX.012.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						50 Unit	50 Unit	100 %				
X.XX.012.09.0009	Pemeliharaan/Rahasi bilisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Divehentikan						1 Unit	1 Unit	100 %				
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													

1.2.07	Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milk Daerah yang disediakan sesuai Standar																		
5.02.0 1.2.07. 0001	Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Disediakan																	1 Unit	
5.02.0 1.2.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																	1 Unit	
5.02.0 1.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																	5 Unit	
5.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar																	100 %	
5.02.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																	12 Laporan	
5.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum																	12 Laporan	

5.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor yang Disebutkan								100 %		
5.02.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya								5 Unit		
5.02.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								50 Unit		
5.02.0 1.2.09 0009	Pemeliharaan/Reha bilas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dimhalkita si								1 Unit		
5.02.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kecepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran								100 %		
5.02.0 2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu Persentase dokumen rancangan perda dan perwali APBD serta rancangan perda dan								100 % 100 % 100 % 100 %		

		penisi P-APBD yang disusun tepat waktu Persentase laporan Perencanaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan																		
5.02.0 2.2.01. 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun																	2 Dokumen	
5.02.0 2.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun																	2 Dokumen	
5.02.0 2.2.01. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	2 Dokumen	
5.02.0 2.2.01. 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD																	2 Dokumen	

5.02.0 2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Daerah Istimewa Pembinaan APBD								100 % 100 %		
5.02.0 2.2.02. 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase laporan Pembelajaran Keuangan Kas Daerah sesuai ketentuan Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai ketentuan										
5.02.0 2.2.02. 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Perimbangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Perimbangan atas SP2D dengan Instansi Terkait									440 Dokumen	
5.02.0 2.2.02. 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pembelajaran dan Perangungjawaba n Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas									1 Dokumen	

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, terdapat terdapat 4 program dan 12 kegiatan.
2. Pada tahun 2024, terdapat terdapat 4 program dan 13 kegiatan
3. Pada tahun 2025, terdapat terdapat 4 program dan 13 kegiatan

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan program/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap capaian program rencana strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya SDM agar memiliki pola pikir kreatif, inovatif dan terampil yang dapat memberikan solusi alternatif terhadap kompleksitas permasalahan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Melakukan sinkronisasi data aset dengan OPD pengguna dan melakukan komunikasi yang aktif antara OPD, BPN, Notaris, Kelurahan, Kecamatan dan warga sekitar obyek sertifikasi status aset tanah dan melakukan identifikasi serta penyempurnaan tata kelola aset.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai pelayanan kinerja OPD maka diperlukan perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto untuk tahun 2025 dan telah dilakukan penandatanganan kesepakatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	86,4
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,75
2	Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD	92,4%
3	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	100%
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,09%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 28.409.278.684,00 ;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 1.329.714.248,00 ;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 1.304.517.400,00;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 1.036.695.680,00;

Sebagaimana analisis kinerja pelayanan yang sudah tertuang dalam Renstra SKPD selama 5 tahun kedepan apa saja kinerja yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Mojokerto untuk mencapai terlaksananya tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang dijalankan oleh SKPD sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	6		7	10	11	12		
1	Nilai SAKIP		v	A	A	A	A	A	A		
2	Indeks Manajemen Risiko		v	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat		v	88,6	88,6	88,6	91,75	91,7	91,7		
4	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD		v	100%	100%	100%	92,4%	100%	100%		
5	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD		v	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		v	10%	10%	10%	5,41%	10%	10%		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan dalam Tugas Pokok dan Fungsi

Tabel 2.9

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan BPKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPKPD)	
1	2	3	4	5
<p>➢ Pelayanan administrasi di bidang pajak daerah</p> <p>➢ Pendataan Pajak Daerah</p> <p>➢ Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah</p> <p>➢ Sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Realisasi pajak daerah tahun 2023 secara umum mencapai target, namun ada beberapa yang tidak mencapai target antara lain :</p> <p>Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2. Untuk Realisasi Retribusi Daerah secara umum tidak mencapai target</p>	<p>SKPD mempunyai wewenang dalam menetapkan besarnya pajak daerah, menerima atau menolak pengajuan keberatan/pengurangan dari WP.</p> <p>Memberikan pelayanan kepada wajib pajak baik secara online maupun offline</p> <p>tersedianya SDM dan sarana prasarana yang memadai</p> <p>Tersedianya payung hukum untuk memungut pajak daerah sebagaimana ditetapkan UU</p> <p>Peningkatan kinerja petugas pemungut pajak daerah disertai dengan pemberian penghargaan kinerja</p>	<p>Sosiologis masyarakat dan juga sebaran populasi tingkat ekonomi di masyarakat dapat mempengaruhi keputusan.</p> <p>Faktor sosial dan politik yang ada di wilayah kota Mojokerto</p> <p>Diperlukan kerja sama dengan pihak ke-III dan SKPD lain untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari SKPD</p> <p>Diperlukan bimbingan teknis atau diklat dari instansi diklat keuangan untuk peningkatan kualitas SDM petugas pemungut pajak</p> <p>Masih lemahnya penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran pajak/retribusi</p> <p>Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak</p> <p>Kerja sama dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan penertiban obyek pajak yang tidak membayar pajak/retribusi</p>	<p>Masih tingginya piutang pajak daerah, khususnya piutang PBB-P2 disebabkan piutang pelimpahan pendaerahan PBB-P2 dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 tepat waktu</p> <p>Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah sesuai UU nomor 1 tahun 2023 ttg PDRD</p> <p>Belum tersedianya ruang arsip dan komputer</p> <p>Kurangnya tenaga teknis (penilai, pemeriksa & juru sita)</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan BPKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPKPD)	
1	2	3	4	5
			Dampak ekonomi global yang dapat menurunkan kegiatan perekonomian di masyarakat misalnya pandemi, perang dan bencana alam	
<p>Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank, pemantauan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD atas dasar Buku kas penerimaan dan pengeluaran dari bank jatim dengan buku kas BUD, serta penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Telah disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Telah dilaksanakannya bintek dan sosialisasi, penyusunan laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank</p> <p>Tersusunnya perwali dan kepwal tentang pengeolaan keuangan daerah,</p> <p>Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumen administrasi keuangan</p>	<p>Telah tersedianya kebijakan/dasar hukum pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Tersedianya SOP pencairan dana yang cukup jelas</p>	<p>Kebijakan pemerintah pusat di bidang pengelolaan keuangan yang berkembang sangat dinamis</p> <p>SKPD terkait tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan dan/atau dokumen keuangan yang dibutuhkan serta SDM yang tersedia kurang memadai</p>	<p>ruang pelayanan SP2D yang ada saat ini tidak memadai dan masih bercampur dengan pelayanan lainnya dan pelaksanaan tupoksi sehari-hari</p> <p>Tempat penyimpanan arsip belum memadai sehingga menyulitkan pencarian kembali</p> <p>Kurangnya jumlah personil pelaksana pengelola keuangan yang memadai</p>
<p>Penyusunan LKPD & Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD</p>	<p>Telah dilaksanakan bimtek & sosialisasi penyusunan LKPD</p> <p>Terlaksananya rekonsiliasi kas dan akuntansi</p>	<p>Telah tersedianya kebijakan akuntansi</p>	<p>Laporan keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi LKPD</p>	<p>Kurangnya pemahaman dan kesadaran OPD akan pentingnya rekonsiliasaset aset dan akuntansi bulanan</p> <p>Kurangnya fitur fitur yang mempermudah penyusunan LK pada aplikasi keuangan</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan BPKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPKPD)	
1	2	3	4	5
				<p>Permasalahan server yang kurang stabil saat digunakan banyak pengguna dalam waktu bersamaan</p> <p>Belum adanya juknis penyusunan LK SKPD dan LKPD</p>
Pengelolaan BMD/Aset	<p>Masih cukup banyak tanah aset yang belum bersertifikat</p> <p>Masih cukup banyak tanah aset yang bermasalah</p>	Terbatasnya personil yang mempunyai kompetensi terkait pengelolaan aset	<p>Investor kurang berminat untuk menanamkan modalnya karena Kota Mojokerto dirasa kurang strategis</p> <p>Tidak ada alas hak</p>	<p>Kurangnya informasi, dokumen dan data terhadap aset, khususnya tanah yang menjadi aset pemerintah kota</p> <p>Masih kurang pahamiannya OPD tentang prosedur penghapusan barang milik daerah dan kemampuan dalam teknologi informasi, serta penilaian aset</p>
Penyusunan KUA, PPAS, APBD dan perubahan	<p>Telah tersusunnya KUA, PPAS APBD dan perubahan</p> <p>Tersedianya aplikasi penyusunan APBD on line</p>	Anggaran yang cukup tersedia	<p>Peraturan yang sering berubah-ubah</p> <p>Lemahnya perencanaan program dan kegiatan SKPD</p> <p>Kurangnya pemahaman SKPD dalam penyusunan anggaran</p> <p>Terlambatnya informasi/juknis pelaksanaan anggaran pusat</p>	<p>Masih kurang pahamiannya OPD tentang penyusunan RKA</p> <p>Keterlambatan OPD dalam melaporkan usulan kegiatan</p> <p>Penyusunan berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja</p>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan BPKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan BPKPD)	
1	2	3	4	5
			Tidak semua anggaran belanja OPD mengacu pada SSH/HSPK/ASB	

2.3.2. Fomulasi Isu-Isu Strategis

Sebagaimana telah digambarkan diatas tentang gambaran pelayanan yang ada dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan adalah :

1. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan masih kurang optimal sehingga data yang ada kurang valid;
2. Tingginya jumlah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah;
4. Masih belum adanya pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya;
5. Penggunaan TI dalam Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal;
6. Pemahaman SKPD terhadap peraturan pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD/aset perlu di update karena peraturan tersebut sering berubah sejalan dengan kebijakan pemerintah;
7. Kurangnya tenaga teknis dan SDM pelaksana yang berkompeten;
8. Pendokumentasian dan pengamanan arsip masih lemah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD telah dilaksanakan setelah dilaksanakan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto. Dan hasil review tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Target Capaian (5)	Pagu Indikatif (Rp.) (6)	Program/Kej. (7)	Lokasi (8)	Indikator Kinerja (9)	Target Capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.) (11)	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD	91,75 undefined	19.962.318.684,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD	91,75 undefined	19.962.318.684,00	(12)
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	100 %	1.335.885,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	100 %	1.335.885,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.335.885,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.335.885,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	100 %	12.107.344.679,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	100 %	12.107.344.679,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menertama Gayi dari Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	12.107.344.679,00	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menertama Gayi dari Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	12.107.344.679,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang milk daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	15.798.843,00	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang milk daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	15.798.843,00	
5.02.01.2.03	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.798.843,00	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.798.843,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	100 %	20.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	100 %	20.000.000,00	
5.02.01.2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	100 %	1.520.096.567,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	100 %	1.520.096.567,00	

No	Rancangan Awal RKPJ						Hasil Analisa Keutuhan						Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keutuhan Dana (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.786.123,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.786.123,00			
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.424.378,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.424.378,00			
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.560.303,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.560.303,00			
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	180.801.807,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	180.801.807,00			
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebuthaan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebuthaan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	58.482.756,00	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	58.482.756,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milk Daerah yang disediakan sesuai Standar	100 %	1.143.332.700,00	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milk Daerah yang disediakan sesuai Standar	100 %	1.143.332.700,00	
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	178.887.600,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	178.887.600,00	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Serana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Serana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pengadaan Serana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	964.445.100,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		964.445.100,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	100 %	4.495.257.946,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	100 %	4.495.257.946,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.181.400,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.181.400,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.297.076.546,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.297.076.546,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milk Daerah yang berfungsi Baik	100 %	659.152.064,00	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milk Daerah yang berfungsi Baik	100 %	659.152.064,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan (1)	Lokasi (2)	Indikator Kinerja (3)	Target Capaian (4)	Pagu Indikator (Rp.) (5)	Program/Keg (6)	Lokasi (7)	Indikator Kinerja (8)	Target Capaian (9)	Kebutuhan Dana (Rp.) (10)	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	131.811.400,00			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	131.811.400,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	87.460.664,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	87.460.664,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	435.890.000,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	435.890.000,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Kualitas penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	90 %	8.324.734.878,46	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Kualitas penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	90 %	8.324.734.878,46	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan penting
	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Target Capaian (5)	Pagu Indikator (Rp.) (6)	Program/Keg (7)	Lokasi (8)	Indikator Kinerja (9)	Target Capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.) (11)	(12)		
5.02.02.2.01 (1)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran	100 %	553.287.741,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran	100 %	553.287.741,00			
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	131.885.937,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	131.885.937,00			
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	131.840.787,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	131.840.787,00			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan (1)	Lokasi (2)	Indikator Kinerja (3)	Target Capaian (4)	Pagu Indikatif (Rp.) (5)	Program/Keg (6)	Lokasi (7)	Indikator Kinerja (8)	Target Capaian (9)	Kebutuhan Dana (Rp.) (10)	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	138.504.853,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	138.504.853,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan (1)	Lokasi (2)	Indikator Kinerja (3)	Target Capaian (4)	Pagu Indikator (Rp.) (5)	Program/Key (6)	Lokasi (7)	Indikator Kinerja (8)	Target Capaian (9)	Kebutuhan Dana (Rp.) (10)	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Kebutuhan Pelayanan Perbendaharaan sesuai Kebutuhan	100 % 100 %	817.426.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Kebutuhan Pelayanan Perbendaharaan sesuai Kebutuhan	100 % 100 %	817.426.000,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	196.250.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	196.250.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Dokumen Hasil Rekonstruksi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan alias SP2D dengan Instansi Terkait	440 Dokumen	71.368.500,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	201.348.300,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	201.348.300,00			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	201.348.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Target Capaian (5)	Pagu Indikator (Rp.) (6)	Program/Key (7)	Lokasi (8)	Indikator Kinerja (9)	Target Capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.) (11)	
5.02.02.2.02.001*	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	148.459.200,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	148.459.200,00	
	(1)										(12)
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100 % 100 %	159.000.507,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100 % 100 %	159.000.507,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban	2 Dokumen	47.003.902,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban	2 Dokumen	47.003.902,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan (1) (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Target Capaian (5)	Pagu Indikator (Rp.) (6)	Program/Keg (7)	Lokasi (8)	Indikator Kinerja (9)	Target Capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.) (11)	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	111.996.605,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	111.996.605,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Usaha Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana	1 Laporan	6.995.020.630,46	Penunjang Usaha Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana	1 Laporan	6.995.020.630,46	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	6.995.020.630,46	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	6.995.020.630,46	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang disusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	200 Laporan	1.304.517.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang disusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	200 Laporan	1.304.517.400,00	

No	Rancangan Awal RKPJ						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan penting
	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Target Capaian (5)	Pagu Indikator (Rp.) (6)	Program/Keg (7)	Lokasi (8)	Indikator Kinerja (9)	Target Capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.) (11)	(12)		
5.02.03.2.01 (1)	Pengelolaan Barang Milk Daerah		Jumlah Laporan Penerimaan BMD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Laporan Perencanaan dan Penatausahaan BMD yang disampaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	20 Laporan 152 Laporan	1.304.517.400,00	Pengelolaan Barang Milk Daerah		Jumlah Laporan Penerimaan BMD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Laporan Perencanaan dan Penatausahaan BMD yang disampaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	20 Laporan 152 Laporan	1.304.517.400,00			
5.02.03.2.01 0001	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	222.640.000,00	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	222.640.000,00			
5.02.03.2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah	25 Dokumen	5.590.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah	25 Dokumen	5.590.000,00			
5.02.03.2.01 0005	Penatausahaan Barang Milk Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah	200 Laporan	104.807.300,00	Penatausahaan n Barang Milk Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah	200 Laporan	104.807.300,00			
5.02.03.2.01 0007	Pengamanan Barang Milk Daerah					Pengamanan Barang Milk Daerah							

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebulhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat (Rp.)	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebulhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.03.2.01.0006	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengisian Barang Milik Daerah	2 Laporan	520.063.300,00	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengisian Barang Milik Daerah	2 Laporan	520.063.300,00	
5.02.04.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Jumlah Laporan Hasil Pengisian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	451.416.800,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Jumlah Laporan Hasil Pengisian Barang Milik Daerah	4 Laporan	451.416.800,00	
5.02.04.2.01.0002	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	1.036.695.680,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	1.036.695.680,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen potensi PAD Persentase realisasi PAD Selain Pajak Daerah Persentase realisasi pajak daerah	1 Dokumen 100 % 100 %	1.036.695.680,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen potensi PAD Persentase realisasi PAD Selain Pajak Daerah Persentase realisasi pajak daerah	1 Dokumen 100 % 100 %	1.036.695.680,00	

No	Rancangan Awal RKKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	44.189.935,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	44.189.935,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	106.400.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	106.400.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	720 Layanan	148.955.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	720 Layanan	148.955.000,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					

No	Rancangan Awal RKP0					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Pemeliharaan dan Verifikasi	1200 Dokumen	211.072.000,00			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Pemeliharaan dan Verifikasi	1200 Dokumen	211.072.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Pemagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemagihan Pajak Daerah	240 Dokumen	153.987.535,00	Pemagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemagihan Pajak Daerah	240 Dokumen	153.987.535,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupaya untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik tingkat kelurahan maupun kecamatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto belum ada usulan program maupun kegiatan yang harus diakomodir pada rencana kerja (RENJA) tahun 2025.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakat Indonesia di berbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Propenas merupakan rencana induk dan acuan perencanaan nasional hasil konsensus serta komitmen bersama masyarakat Indonesia, yang memuat target pencapaian visi dan misi bangsa. Propenas juga merupakan sarana untuk menyatukan persepsi, pandangan dan langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia sesuai karakteristik dan budaya dalam menyusun dan melaksanakan prioritas pembangunan pada masa yang akan datang.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah untuk melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kota Mojokerto menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan sebagai acuan rencana tindak, setiap tahun Pemerintah Kota Mojokerto menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijabarkan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan menyusun Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga terjalin hubungan keselarasan yang saling melengkapi mulai dari proses perencanaan program kegiatan dan perencanaan anggaran sampai

dengan pertanggungjawaban dan pelaporan dengan tetap berpedoman pada Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa mendatang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja BPKPD yang bersinergi dengan Rencana Strategis 2025-2030, yaitu "Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)".

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dan dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu "Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD", "Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD" dan "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah".

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah sesuai Renstra 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	5	6	7	8	9	10	
			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,09	8	9	10	11	11	

Adapun tujuan dari rencana kerja tahunan ini adalah sebagai bentuk dari evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dimana dalam pelaksanaan kegiatan untuk pelayanan yang diberikan oleh BPKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masih ada hambatan yang mempengaruhi, dan hambatan tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun selanjutnya yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang berkesinambungan.

Sedangkan yang menjadikan sasaran dari rencana kerja tahunan adalah pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang pada tahun sebelumnya dalam pelaksanaannya masih dirasa belum optimal capaian kegiatannya atau belum tuntas pelaksanaan kegiatannya.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh PD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengalihan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk mengimplementasikan dari Visi Misi yang telah dibuat oleh Walikota Terpilih, sebagai wujud dari janji untuk melaksanakan pembangunan Kota Mojokerto selama 3 tahun ke depan, maka OPD sebagai pelaksana dari Visi, Misi tersebut tentunya akan menuangkannya dalam bentuk Program dan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPD yang tertuang dalam rencana kerja adalah merupakan perwujudan dari isu-isu pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya yang pengacu pada pelayanan BPKPD dalam menunjang visi dan misi walikota terpilih.

Prioritas program yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Mojokerto Tahun 2025 ditentukan dengan mensinergikan Prioritas Program Pembangunan Kota Mojokerto dengan Renstra BPKPD Kota Mojokerto kemudian diurutkan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, dimana dalam prioritas program tersebut BPKPD Kota Mojokerto tercakup dalam agenda 1 yaitu :

Program Utama :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan) ;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah) ;

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bidang Aset).

Program Penunjang :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk menu jutkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

Adapun rumusan program dan kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.33 berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Usain/Bidang Usain Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Luasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				30.628.266.642,46				32.159.679.974,00
5.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				30.628.266.642,46				32.159.679.974,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPM/PPD		91,75 undefined	19.962.318.684,00			-	20.960.434.617,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengerangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengerangan dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar		100 %	1.335.885,00			-	1.402.679,00
5.02.01.2.01.0001	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1.335.885,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.402.679,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar		100 %	12.107.344.679,00			-	12.712.711.913,00
5.02.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		47 Orang/bulan	12.107.344.679,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.712.711.913,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milk daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi		100 %	15.796.843,00			-	16.589.795,00
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD		2 Laporan	15.796.843,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.589.795,00

Kode	Usnes/Bidang Usnes Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi (4)	Target Capaian (5)	Pagu Indikator (Rp.) (6)	Sumber Dana (7)	Target Capaian (9)		Kebutuhan Dana (Rp.) (10)	
5.02.01.2.05 (1)	Administrasi Kepagawean Perangkat Daerah (2)	Persentase Administrasi Kepagawean PD yang terpenuhi sesuai standar (3)		100 % (5)	20.000.000,00 (6)			- (9)	21.000.000,00 (10)	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
5.02.01.2.05.0009		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang (5)	20.000.000,00 (6)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21.000.000,00 (10)	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 % (5)	1.520.096.597,00 (6)			- (9)	1.596.101.395,00 (10)	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 Paket (5)	35.796.123,00 (6)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37.575.429,00 (10)	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket (5)	87.424.378,00 (6)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91.795.597,00 (10)	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket (5)	81.560.303,00 (6)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85.638.318,00 (10)	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket (5)	180.801.807,00 (6)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			189.841.897,00 (10)	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacuan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen (5)	58.482.756,00 (6)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61.406.894,00 (10)	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Cetakan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)				Target Capaian	Kebijakan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	1.076.041.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.129.843.250,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar		100 %	1.143.332.700,00			-	1.200.499.335,00	
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	178.887.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)			187.831.880,00	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	964.445.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.012.667.355,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar		100 %	4.495.257.946,00			-	4.720.020.843,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	198.181.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			208.090.470,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	4.297.076.546,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.511.830.373,00	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(7)	(9)	(10)	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang bertunggal Baik		100 %	659.152.064,00		-	692.109.667,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pagainya		9 Unit	131.811.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		139.401.970,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	87.460.664,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		91.833.697,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	438.890.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		461.874.000,00	
6.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kualitas pengerjaan yang disusun sesuai ketentuan		90 %	8.324.734.878,46		-	8.740.571.622,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran		100 %	553.287.741,00		-	580.952.128,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	131.895.937,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		139.480.234,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	131.840.787,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		139.432.826,00	

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD		2 Dokumen	138.504.853,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			145.430.096,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD		2 Dokumen	151.056.164,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			158.608.972,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase laporan Penelaahan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan Persentase Laporan Perencanaan sesuai Ketentuan		100 % 100 %	617.426.000,00			-	648.297.300,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		60 Dokumen	198.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			208.082.500,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Cekatan Penting	Pertumbuhan Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian	Keuntungan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Peluruk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Dulu Perencanaan dan Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan Pembiayaan atas SP2D dengan instansi Terkait		1 Dokumen	201.348.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			211.415.715,00	
5.02.02.2.02.0011	Pertinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		200 Orang	148.459.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			155.882.160,00	
5.02.02.2.03.0002	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Personilise OPD yang melakukan rekonsiliasi sesuai SAP Personilase Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP		100 % 100 %	159.000.507,00				168.950.532,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Beban, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									

Kode	Usury/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO, dan Beban		2 Dokumen	47.003.902,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49.354.087,00
				16 Laporan	111.996.605,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			117.596.435,00
5.02.02.2.04	Penunjang Usuran Kemungkinan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Tersedianya dana darurat pemanngulangan bencana		1 Laporan	6.995.020.630,46			-	7.344.771.562,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1 Laporan	6.995.020.630,46	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.344.771.562,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang disusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan		200 Laporan	1.304.517.400,00			-	1.369.743.270,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemertasaan BMD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Laporan Perencanaan dan Penatausahaan BMD yang disampaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan		20 Laporan 152 Laporan	1.304.517.400,00			-	1.369.743.270,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			3 Dokumen	222.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			233.772.000,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								

Kode	Usuran/Bidang Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian		Kebuthaan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah		25 Dokumen	5.590.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.969.500,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah		200 Laporan	104.807.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.047.665,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milk Daerah		2 Laporan	520.063.300,00	-			546.096.465,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah		4 Laporan	451.416.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			473.967.640,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah		100 %	1.036.695.680,00			-	1.088.530.465,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen potensi PAD Persentase realisasi PAD Selain Pajak Daerah Persentase realisasi pajak daerah		1 Dokumen 100 % 100 %	1.036.695.680,00				1.088.530.465,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			2 Dokumen	272.091.210,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			285.695.771,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analsis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		12 Laporan	44.169.935,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46.399.432,00	

Kode	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Laporan	106.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			111.720.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		720 Layanan	148.955.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			158.402.750,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dikukuhkan Penelitian dan Verifikasi		1200 Dokumen	211.072.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			221.625.600,00	
5.02.04.2.01.0011	Peragran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Peragran Pajak Daerah		240 Dokumen	153.967.535,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			161.696.912,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perhitungan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		1 Laporan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106.000.000,00	
					30.628.266.642,46				32.158.679.974,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dijalankan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 19.962.318.684,00 yang terdiri dari 8 kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 1.335.885,00 ;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 12.107.344.679,00;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 15.798.843,00;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 20.000.000,00;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 1.520.096.567,00;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.143.332.700,00;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 4.495.257.946,00,00 ;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 659.152.064,00;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 8.324.734.878,46 yang terdiri dari 4 kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Rp. 553.287.741,00;
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rp. 617.426.700,00;
 - c. Persentase laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP Rp. 159.000.507,00;
 - d. Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 6.995.020.630,46;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 1.304.517.400,00 dengan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 1.190.130.407,00;
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 1.382.784.469,00 dengan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 1.036.695.680,00;

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto 2025-2030 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Mojokerto serta Target dan Sasaran Pembangunan.

Dengan adanya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto.

Akhir kata semoga Renja BPKPD Kota Mojokerto ini dapat dipergunakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Mojokerto, 24 Juli 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH
KOTA MOJOKERTO



RIYANTO S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 006

LAMPIRAN

Penmutakhiran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

RENSTRA 2024 - 2026				PENUTAKHIRAN					
Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH									
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN			
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD	81,45 level 2 88,6	23.125.800.324,3 5	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD	81,45 level 2 88,6	24.290.346.185
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	100%	1.316.590,00	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	100 %	1.339.382,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.316.590,00	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.339.382,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	100%	9.047.007.095,65	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	100 %	8.929.567.308,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang	9.047.007.095,65	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	8.929.567.308,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100%	47.838.560,15	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	15.798.843,00

MENDIRIA 2024 - 2026							PEMUTAKHIRAN			
Kode	Urusan / Bidang	Indikator Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan / Sub	Target 2026	Pagu Indikator 2026	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Bidang / Kegiatan / Sub-Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan / Sub	Target 2026	Pagu Indikator 2025	
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	47.838.560,15	5.02.01.2.03.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15.798.843,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	100%	1.230.000.592,45	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	100 %	1.440.242.304,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.232.475,00	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	17.900.693,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	98.809.692,50	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.425.988,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	178.642.022,50	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	46.831.733,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	204.348.689,38	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	180.807.956,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	43.494.850,00	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	58.484.334,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	694.472.863,08	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.048.791.600,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	100%	250.440.476,75	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	100 %	1.133.765.004,00	
					5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	178.887.600,00	

MENDIRI 2024 - 2026						PEMUTAKHIRAN					
Kode	Urusan / Bidang / /	Indikator Program / /	TARGET 2024	Pagu Indikator 2024	Kode	Urusan / Bidang Urusan / /	Indikator Program / /	TARGET 2024	Pagu Indikator 2025		
					5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	260.440.476,75	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	954.877.404,00		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	100%	12.198.350.631,10	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	100%	12.509.262.458,00		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.548.083.971,98	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.494.249.714,00		
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.650.266.659,13	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.015.012.744,00		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	100%	340.646.378,25	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	100%	260.370.886,00		
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	131.149.653,00	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	46.730.956,00		
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	90.811.463,75	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	58.627.536,00		
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	118.685.262,50	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	155.012.400,00		

RENSTRA 2024 - 2026							PEMUTAKHIRAN			
Kode	Urusan / Bidang / Program / Subprogram /	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikator 2025	Kode	Urusan / Bidang / Program / Subprogram / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikator 2025	
		Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	1	9.432.890.686,55						
5.02.02	PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran	100%	7.907.291.416,25	5.02.02	PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran	100 %	20.369.528.874	
		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penatausahaan Sesuai Ketentuan	100%							
		Persentase Laporan Keuangan OPD dengan Catatan Baik	100%							
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu	100%	645.594.815,00	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu	100%	595.279.702	
		Persentase dokumen rancangan perda dan perwali APBD serta rancangan perda dan perwali P-APBD yang disusun tepat waktu	100%				Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	100%		
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	75.994.320,00	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	149.730.121,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	2	84.200.982,50	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	154.700.522,00	

RENSTRA 2024 - 2026						PENGANTARAN					
Kode	Ususan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikator 2025	Kode	Ususan / Bidang Ususan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikator 2025		
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	285.300.857,50	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	139.106.838,00		
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	200.058.655,00	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	154.700.522,00		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai ketentuan Perbendaharaan Daerah	100%	694.120.826,25	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai ketentuan Perbendaharaan Daerah	100%	617.426.700,00		
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	256.352.500,00	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	196.250.000,00		
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	440 Dokumen	74.225.375,00	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	440 Dokumen	71.368.500,00		
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Peraturan Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kas serta	Jumlah Peraturan Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	1 Dokumen	209.352.150,00	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Peraturan Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Peraturan Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	201.348.550,00		

RENSTRA 2024 - 2026						PEMUTAKHIRAN					
Kode	Urusan / Bidang <i>Keuangan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</i>	Indikator Program / <i>Kualitas / Sub</i>	Target <i>2025</i>	Pagu Indikator <i>2025</i>	Kode	Urusan / Bidang Urusan / <i>Program / Kegiatan / Sub</i>	Indikator Program / <i>Kualitas / Sub Kegiatan</i>	Target <i>2025</i>	Pagu Indikator <i>2025</i>		
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Pentastuhan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pentastuhan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	134.190.801,25	5.02.02.2.02. 0011	Pembinaan Pentastuhan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pentastuhan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	148.459.650,00		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Kas dan Akuntansi tepat waktu	100%	411.575.775,00	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	185.673.107,00		
5.02.02.2.03.0003	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO, dan Beban	852 Dokumen	266.426.712,50	5.02.02.2.03. 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan- LO, dan Beban	852 Dokumen	49.463.502,00		
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	86 Laporan	151.149.062,50	5.02.02.2.03. 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	86 Laporan	136.709.605,00		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Tersedianya dana darurat penanggulangan	1 laporan	6.000.000.000,00	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana	1 Laporan	18.971.149.365,00		

RENSTRA 2024 - 2026						PEMUTAKHIRAN					
Kode	Ususan / Bidang / Layanan / Subsektor / Keuangan Daerah	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikator 2025	Kode	Ususan / Bidang Ususan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikator 2025		
5.02.02.2.04.0009	Perencanaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	6.000.000.000,00	5.02.02.2.04.0009	Perencanaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	18.971.149.365,00		
	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	100%	1.525.599.270,30							
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Bergerak dan tidak bergerak yang digunakan	95%	1.571.367.248,41	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan	95 %	1.382.784.469,00		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku	100%	1.525.599.270,30	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku	100%	1.382.784.469,00		
		Persentase Barang Milik Daerah yang di Monev	100%				Persentase Barang Milik Daerah yang di Monev	100%			
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	377.802.155,73	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	354.937.469,00		
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	24 Dokumen	13.024.470,00	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	24 Dokumen	16.356.800,00		
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	528.836.617,08	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	495.333.300,00		
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	580.650.450,00	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	481.497.800,00		
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	25.275.577,50	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	34.659.100,00		

RENSTRA 2024 - 2026						PEMUTAKHIRAN					
Kode	Unsur / Bidang / Kegiatan / Dokumen / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikatif 2025	Kode	Unsur / Bidang Unsur / Dokumen / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target 2025	Pagu Indikatif 2025		
5.02.04.2.01	Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan asli Daerah	10%	1.298.863.981,30	5.02.04.2.01	PROGRAM PENGELUARAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	1.190.130.407,00		
			100%	1.298.863.981,30				100%	1.190.130.407,00		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	100%	1.298.863.981,30	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	100%	1.190.130.407,00		
			13%					14%			
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	348.027.997,96	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	307.091.216,00		
5.02.04.2.01					5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyeberlusan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyeberlusan Kebijakan Pajak Daerah	12	44.189.931,00		
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	720	181.876.571,58	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	720	187.762.462,00		
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1200	233.177.834,92	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1200	227.490.571,00		
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	240	233.281.624,84	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pajak Daerah	240	182.996.229,00		

RENSTRA 2024 - 2026						PEMUTAKHIRAN						
Kode	Urusan / Bidang / Layanan / Divisi / Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Indikator Program / Kualitas / Sub Kualitas / Sub Kualitas / Sub	TARGET 2024 1 Laporan	Pagu Indikator 2024 102.500.000,00	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Divisi / Layanan / Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Indikator Program / Kualitas / Sub Kualitas / Sub Kualitas / Sub	TARGET 2025 1 Laporan	Pagu Indikator 2025			
5.02.04.2.01.0015		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah			5.02.04.2.01. 0015		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah		100.000.000,00			

